

Pemberitaan Kasus Tambang di Pulau Flores

Analisis Pemberitaan Kasus Penolakan Tambang di Pulau Flores
Dalam Surat Kabar Harian Umum Flores Pos

Maria Septian / Mario Antoius Birowo

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta 55281

Abstraksi

Secara nasional kasus tambang di Pulau Flores masuk dalam daftar kasus tambang yang mengemuka dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang. Kasus tambang di Pulau Flores tidak dapat dipisahkan antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya di Flores. Setiap kabupaten memiliki polemik tentang tambang dan jenis tambang yang berbeda-beda.

Metode Analisis Framing digunakan dalam penelitian ini sebagai strategi dalam konstruksi realitas media massa. Bagaimana Flores Pos sebagai koran yang mendominasi wilayah Pulau Flores dalam meberitakan penolakan tambang ini. Tambang adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Penelitian mengenai kasus tambang di Pulau Flores dalam surat kabar harian umum Flores Pos dilalukan dalam dua level yaitu level teks dan level konteks. Hal ini digunakan untuk mengetahui *frame* yang digunakan Flores Pos dalam melihat kasus tambang ini. Analisis level teks berisi tentang bagaimana Flores Pos

mengangkat realita yang ada di masyarakat dengan kaca mata framing, sedangkan analisis level konteks dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Flores Pos.

Flores Pos membingkai kasus penolakan tambang melalui kaca mata missioner dan Flores Pos memihak kepada masyarakat Flores yang menolak tambang. Flores Pos mampu memposisikan dirinya sebagai media yang menyuarakan kepentingan rakyat dan menjadi media yang peduli terhadap lingkungan.

Kata kunci : Kasus Tambang, Analisis Framing, Flores Pos

A. Latar Belakang

Berbagai pulau, baik pulau besar maupun kecil serta wilayah perairan di NTT memiliki beragam potensi. Salah satunya adalah potensi pertambangan mineral dan batubara. Kepulauan Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa pulau di antaranya Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Alor dan pulau-pulau kecil lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan Khatulistiwa pada posisi $8^{\circ} - 12^{\circ}$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} - 125^{\circ}$ Bujur Timur, yang memiliki batas-batas wilayah antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat.¹

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, Diantara 432

¹ Data letak geografis NTT diakses dari <http://www.kpptspprovntt.org/profil-ntt/letak-geografis.html>. tanggal 5 Februari pukul 12.00 WIB

pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain.

Potensi pariwisatanya terletak pada keindahan alamnya yaitu pantainya dan hewan reptilia tertua di dunia yaitu Komodo. Namun, siapa yang menyangka kepulauan yang masuk dalam daftar provinsi tertinggal di Indonesia ini memiliki potensi tambang pasir besi yang sangat menjanjikan. Kabar ini mulai tersebar ke masyarakat pada tahun 2008 lalu. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga elit politik di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isu pembangunan tambang ini terjadi di beberapa kabupaten di daratan Pulau Flores. Salah satunya adalah kabupaten Ende, yaitu penambangan Pasir Besi ini dilakukan di area Pantai Nangaba.

Kegiatan penambangan Pasir Besi di Nangaba, kabupaten Ende ini menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat dan tokoh agama Katolik di Kabupaten Ende. Hal ini menjadi pemberitaan yang besar dan diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media online. Pemberitaan di media massa lokal seperti Flores Pos juga memberitakan mengenai penolakan tambang di kabupaten Ende tersebut. Penulis ingin melihat bagaimana media massa lokal (wilayah NTT) mengkonstruksikan peristiwa penolakan tambang dalam pemberitaannya. Kasus ini awalnya dilihat sebagai kasus politik-ekonomi. Namun, dalam pemberitaannya selalu mengaitkannya dengan agama. Pemberitaan mengenai peolakan tambang ini tidak berhenti pada tahun 2010 saja tetapi berlanjut hingga awal tahun 2013 dengan puncaknya ketika terjadi demo besar-besaran di Kantor Bupati Ende. Demo ini dilakukan oleh aktivis lingkungan, para pastor sekevikepan Keuskupan Agung Ende bersama ratusan mahasiswa.

Kasus tambang di Pulau Flores tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, meskipun setiap kabupaten di Pulau Flores memiliki polemik tentang tambang dan jenis tambangnya berbeda-beda. Di Kabupaten Manggarai terdapat tambang Mangan, di Ende terdapat tambang marmer dan pasir besi, dan di Lembata terdapat tambang emas. Beberapa menolak kabupaten ini termasuk

dalam garis merah karena Gereja Nusra menolak segala bentuk ijin dan aktivitas tambang di sini.

Secara nasional kasus tambang di Pulau Flores masuk dalam daftar kasus tambang yang mengemuka dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan oleh PT. Freeport, PT. Newmont Minahasa, PT. Newmont, Kaltim Prima Coal, Indo Moru Kencana dan masih banyak lagi. Kini lebih dari 35% total daratan di Indonesia telah diberikan kepada 1194 Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya dan 257 Pemegang Kuasa Pengangkutan dan Penjualan (PKP2) Batu Bara. Mayoritas dari operasi pertambangan di Indonesia adalah milik perusahaan asing lintas negara.²

Media massa dapat mempengaruhi pemahaman makna dari suatu kasus di masyarakat, dengan kata lain media membuat bingkai mengenai suatu kasus. Penelitian mengenai pembingkai media ini sebelumnya juga pernah dilakukan. Penelitian tersebut mengenai media di Eropa yang mempengaruhi pemahaman warga tentang suatu isu tertentu, termasuk isu politik.³

Di Indonesia sendiri penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan mengenai pemberitaan konflik Israel-Palestina yang di Harian Kompas dan Radar Sulteng.⁴ Bagaimana Harian Kompas dan Radar Sulteng menyajikan berita mengenai konflik ini? Harian Kompas cenderung tidak memberikan pernyataan yang meringankan posisi Palestina dan sebaliknya. Sedangkan Radar Sulteng melihat kasus ini secara sempit atau secara pandangan lokal. Penelitian ini melihat bagaimana kedua media massa ini (Harian Kompas dan Radar Sulteng) memberikan solusi terhadap konflik ini yaitu perdamaian.

Media massa ini memiliki potensi untuk memberikan pengaruh kepada pembacanya melalui pemberitaannya. Flores Pos identik dengan kegiatan

² www.jatam.org/hyperlink. Diakses tanggal 12 Desember 2013

³ Sophie Lecheler dan Claes H. de Vreese, *News Framing and Publik Opinion: A mediation analysis of framing effects on political attitudes*, (Sage, journalism and mass communication quarterly. 2012.) halaman 2

⁴ Achmad Herman dan Jimmy Nurdiansa, *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel-Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng*, (Palu : Jurnal Komunikasi 2010) halaman 167

misionaris Serikat Sabda Allah (SVD). Bahkan sikap keras gereja yang menolak keras kegiatan penambangan ini beberapa kali menjadi *headline* di surat kabar harian umum Flores Pos. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberitaan kasus penolakan tambang di Pulau Flores. Pemberitaan ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya unsur kedekatan psikologis agama dengan masyarakat Flores yang mayoritas beragama Katolik dan kepemilikan Flores Pos yang notabene milik misionaris SVD Ende.

Penolakan tambang mulai menyebar luar ketika tahun 2010, Surat Kabar Harian Umum Flores Pos memberitakan penolakan tambang oleh para nelayan Lembata.⁵ Selain itu pemberitaan Flores Pos juga menghadirkan penolakan tambang yang dilakukan oleh warga di ujung barat Flores yaitu daerah Manggarai.⁶ Pemberitaan mengenai penolakan tambang ini tidak berhenti pada tahun 2010 saja tetapi berlanjut hingga awal tahun 2013 dengan puncaknya ketika terjadi demo besar-besaran di kantor bupati Ende. Demo ini dilakukan oleh aktivis lingkungan, para pastor sekevikepan Keuskupan Agung Ende bersama ratusan mahasiswa.

Flores Pos memuat berkali-kali berita mengenai kasus penolakan tambang, bahkan hingga dua rubrik dalam satu edisi. Bahkan, penolakan tambang selalu diberitakan dengan mengaitkan masyarakat dan para tokoh agama. Beberapa kali *headline* Flores Pos selalu menampilkan sikap gereja terhadap tambang di Flores, sedangkan sikap para elit politik daerah proporsinya lebih kecil untuk menjadi *headline*. Sebagai surat kabar harian umum milik misionaris (Katolik),

⁵ “Di timur, petani dan nelayan Flores-Lembata dan pulau sekitarnya bersikukuh menolak segala upaya eksplorasi dan eksploitasi tambang. Karena itu, mereka juga menolak segala upaya regulasi dan kebijakan yang membahayakan keselamatan ekologi dan ekososial”. (*Flores Pos* Rabu 3 November 2010).

⁶ “Di barat, di Labuan Bajo, ibu kota Mabar, Senin 1 November 2010, Geram gelar unjuk rasa tolak tambang. Pada hari itu juga, Bupati Agus Ch Dula gelar pertemuan dengan para investor tambang. Di hadapan investor, ia nyatakan tolak tambang. Di hadapan Geram, ia juga nyatakan tetap tolak tambang”. (*Flores Pos* Rabu 3 November 2010).

kemungkinan besar Flores Pos mempunyai kepentingan dalam memberitakan penolakan tambang di Flores dengan menampilkan penolakan dari pihak gereja.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai SKH Flores Pos dalam memberitakan kasus penolakan tambang di pulau Flores.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat artikel berita Surat Kabara Harian Umum Flores pos yang dianalisis untuk level konteks dengan menggunakan perangkat framing model Gamson dan Modigliani. Peneliti menemukan *frame* dari keempat artikel berita tersebut. *Frame* tersebut dapat dilihat dalam tabel yang ada sebagai berikut :

Frame 4 artikel berita Flores Pos tentang kasus penolakan tambang

No	Judul Berita	Frame Berita
1	Uskup Sensi : Gereja Nusra Tolak Tambang (<i>Headline</i> Flores Pos, 4 Januari 2014)	<i>Frame</i> yang digunakan Flores Pos dalam berita ini adalah Penolakan tegas Gereja-gereja Katolik di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Bali, NTB dan NTT. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Uskup sensi selaku Uskup Agung Ende yang membawahi seluruh Keuskupan di wilayah Nusa Tenggara. Dalam penolakannya Uskup Sensi menyatakan bahwa seseorang masih dianggap Kristiani adalah orang yang menolak tambang, karena menolak tambang adalah salah satu sikap untuk ikut peduli terhadap kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya.
2	Ende dan Sikka Demo Tolak Tambang (<i>Headline</i> Flores Pos, 20 Maret 2012)	<i>Frame</i> yang digunakan oleh Flores Pos dalam pemberitaan ini adalah reaksi penolakan oleh masyarakat mengenai kebijakan tambang di Pulau Flores. Masyarakat di dua kabupaten yaitu Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka menolak segala bentuk kegiatan tambang. Mereka tidak ingin pada masa pemimpin mereka (bupati) memerintah, pemerintahannya terpengaruh oleh kepentingan tertentu termasuk kepentingan investor.
3	Serise dan Satarteu Bisa “Bantang Cama” (Rubrik Manggarai Flores Pos, 6 Januari 2011)	<i>Frame</i> yang digunakan oleh Flores Pos dalam pemberitaan ini adalah Tambang telah menjadikan dua suku yang masih ada hubungan kekerabatan

		<p>menjadi renggang. Perselisihan karena perbedaan pendapat tentang tambang ini mengakibatkan perang dingin yang berkepanjangan.</p> <p>Berdasarkan berita ini Flores Pos menunjukkan posisinya sebagai media massa yang masih melihat kasus tambang ini dari dua sisi. <i>Frame</i> yang ingin dibangun oleh Flores Pos adalah bagaimana masyarakat harus memandang kasus ini dari dua sisi. Baik dari sisi pro dan kontra terhadap tambang.</p> <p>Di balik penolakan secara besar-besaran oleh masyarakat dan tokoh agama serta LSM peduli lingkungan masih ada kelompok kecil atau kelompok minoritas yang masih menerima keberadaan tambang. Mereka menerima karena tambang membuka lahan pekerjaan baru bagi mereka yang hidup di sekitar tambang.</p>
4	Mangan dari Manggarai Diekspor Ke China (Rubrik Manggarai Flores Pos, 26 Januari 2011)	<p><i>Frame</i> yang digunakan dalam artikel ini adalah “Masyarakat Manggarai sulit untuk dapat sejahtera dari pertambangan”. Flores Pos menuliskan bahwa jumlah Mangan yang diambil oleh tiap perusahaan itu berbeda. Harga jual Mangan juga sangat rendah.</p>

*Tabel ini merupakan sambungan dari tabel pada halaman 6

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menggabungkan empat *frame* yang ada. Berdasarkan *frame* yang sudah ditemukan dan dipaparkan dalam tabel di atas, peneliti melihat adanya beberapa *frame* besar dalam analisis level teks ini yaitu :

- 1) Pemerintah kabupaten-kabupaten di pulau Flores yang termasuk kelompok Pro tambang adalah pemerintah Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, Nagakeo, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Hal ini menimbulkan masalah besar karena masyarakatnya menolak dan kebijakan pemerintah dinilai tidak transparan. Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada para investor tanpa ada sosialisai dan kebijakan masalah lahan masyarakat yang akan dijadikan area penambangan.
- 2) Tidak semua masyarakat menolak tambang, karena publik harus tahu masih ada sekelompok masyarakat yang pro tambang karena tambang merupakan lahan pekerjaan baru bagi kelompoknya, yaitu masyarakat Serise. Namun, pemerintah harus objektif dan publik juga harus tahu bahwa masih ada pihak

yang pro tambang dan perbedaan ini bukan menjadi dasar untuk pecahnya perselisihan tetapi bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.

D. Analisis Konteks

Pada tahapan analisis konteks ini peneliti melakukan wawancara dengan Pemimpin Redaksi (PemRed) dari Harian Umum Flores Pos yaitu Pater John Dami Mukese, SVD mengenai kegiatan keredaksionalan Harian Umum Flores Pos. Melalui wawancara ini untuk mengetahui bagaimana Harian Umum Flores Pos mengolah beritanya serta bagaimana Flores Pos melihat kasus Penolakan Tambang di pulau Flores ini.

Dalam analisis konteks ini peneliti menggali secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang mempengaruhi *frame building* dari sisi Harian Umum Flores Pos. Wawancara ini dianggap penting oleh peneliti, karena asumsi dasar framing salah satunya berada pada level individu. Wartawan (individu) selalu melibatkan pengalaman hidupnya, wawasan sosial termasuk ideologi yang dianutnya dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasikan pesan yang diterimanya.

Pengalaman dan pengetahuan individu akan mengendap dan mengkristal kemudian memberikan kemampuan bagi individu yang bersangkutan untuk memetakan, menerima, mengidentifikasi dan memberikan label pada informasi yang diterima. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga tingkatan. Pertama wawancara pada keredaksian, kedua dengan wartawan dan yang ketiga adalah wawancara terkait dengan artikel Kasus Tambang.

A. Flores Pos sebagai Media Konstruksi tentang Tambang di Pulau Flores

Flores Pos sebagai media tertua di Pulau Flores mencoba untuk menjadikan dirinya sebagai media yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Flores. Realita yang terjadi di masyarakat bahwa kebijakan mengenai

pertambangan telah mengakibatkan puluhan hektar lahan masyarakat menjadi rusak termasuk hutan lindung dan tanah adat. Hal inilah yang diangkat Flores Pos dalam pemberitaannya.

Sebagai surat kabar paling mendominasi Pulau Flores, Flores Pos melalui pemberitaannya menunjukkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah daerah beberapa kabupaten di Pulau Flores terkait dengan izin Usaha Pertambangan (IUP). Konstruksi yang dibangun oleh Flores Pos ini tentunya lewat pemberitaannya mulai tahun 2008 hingga awal tahun 2013 yang terdapat 25 pemberitaan. Dari 25 artikel terkait tambang ini hampir seluruhnya diisi dengan penolakan tambang yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Pulau Flores Pos.

Intinya Flores Pos mencoba membangun konstruksi pendapat masyarakat Flores bahwa tambang bukan satu-satunya jalan untuk memajukan Pulau Flores. Tambang hanya salah satu upaya untuk mempercepat kemiskinan di wilayah ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pater Dami, SVD pada tanggal 13 Februari 2014 pemimpin Redaksi Flores Pos, pemberitaan kasus tambang ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat dan kalangan elit dalam mengambil keputusan di Flores tentang bahaya tambang untuk saat ini dan dampak-dampaknya dalam jangka panjang ke depannya. Flores Pos juga sangat pro lingkungan dan konsisten dengan misinya yang menyelamatkan lingkungan. Flores pos berusaha untuk tetap kritis terhadap kelompok yang pro tambang dan meyakinkan mereka tentang dampak negatif dari tambang.

Flores Pos sebagai media massa pertama di Pulau Flores menjadi sangat familiar di masyarakat Flores. Dilihat dari sejarah berdirinya, Flores Pos dibentuk oleh beberapa biarawan dari ordo Serikat Sabda Allah atau biasa disebut SVD yang berpusat di Kabupaten Ende. Berada di bawah naungan SVD, menjadikan Flores Pos sebagai koran yang benafaskan Kristen. Hal ini terlihat dari visinya mengenai JPIC yang merupakan singkatan *pro Justice, peace and intergrity of creation*, yaitu tegaknya kebenaran, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.⁷ Visi ini merupakan visi dari badan tarekat Katolik yang dimiliki oleh ordo SVD dan OFM.

Pemberitaan mengenai kasus tambang di Pulau Flores dalam Harian umum Flores Pos diangkat ke publik sejak tahun 2008 hingga awal tahun 2013. Flores Pos selalu menampilkan bahaya mengenai tambang dan melihat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan. Flores Pos membangun opini di masyarakat bahwa tambang itu berbahaya. Melalui pemberitaannya Flores Pos juga menunjukkan pendapatnya bahwa kebijakan mengenai tambang tersebut tidak tepat. Hal ini jika dikaitkan dengan teori Media sebagai Agen konstruksi, maka Flores Pos menempatkan dirinya sebagai media konstruksi tersebut yang membangun konstruksi di masyarakat Flores bahwa tambang itu berbahaya.

peneliti melihat adanya beberapa *frame* besar dalam analisis level teks ini yaitu Pemerintah kabupaten-kabupaten di pulau Flores yang termasuk kelompok pro atau yang setuju adanya tambang adalah pemerintah Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, Nagakeo, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Hal ini

⁷ Redaksi Flores Pos, dikirim via email tanggal 10 Februari 2014

menimbulkan masalah besar karena masyarakatnya menolak dan kebijakan pemerintah dinilai tidak transparan. Karena pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada para investor tanpa ada sosialisasi dan kebijakan masalah lahan masyarakat yang akan dijadikan area penambangan. Tidak semua masyarakat menolak tambang, karena publik harus tahu masih ada sekelompok masyarakat yang pro tambang karena tambang merupakan lahan pekerjaan baru bagi kelompoknya, yaitu masyarakat Serise. Namun, pemerintah harus objektif dan publik juga harus tahu bahawa masih ada pihak yang pro tambang dan perbedaan ini bukan menjadi dasar untuk pecahnya perselisihan tetapi bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.

B. Frame Besar Surat Kabar Harian Umum Flores Pos

Peneliti telah melakukan analisis teks dan analisis konteks mengenai artikel terkait kasus penolakan tambang di Pulau Flores dalam Harian Umum Flores Pos. Peneliti akan merumuskan hasil dari analisis teks dan analisis konteks untuk menjawab rumusan masalah pada Bab 1 yaitu, bagaimana Surat Kabar Harian Umum Flores Pos membingkai kasus tambang di Pulau Flores. Berikut Frame besar Flores Pos :

1. Flores Pos melihat tambang sebagai satu pendekatan pembangunan yang kurang tepat.
2. Flores Pos Berusaha Menyatukan opini Masyarakat Tentang Bahaya Tambang (Satu Tujuan Menolak Tambang)
3. Flores Pos Membangun Konstruksi “Tambang itu Berbahaya”

4. Flores Pos Tidak Menyebut Kasus Tambang Masuk dalam Ranah Agama

E. Kesimpulan

Kasus Tambang di Pulau Flores mulai dimuat dalam pemberitaan Media Massa Lokal (Surat Kabar Harian Umum Flores Pos) pada tahun 2008. Awal pemberitaannya mengenai penolakan dan dampak tambang di Manggarai. Ratusan kali aksi demo digelar. Surat Kabar Harian Umum Flores Pos semakin gencar memberitakan penolakan tambang ini.

Flores Pos sendiri, sebagai media massa lokal, merasa kasus ini sangat penting untuk masyarakat Flores. Adanya unsur *Prominance* dan *Proximity* membuat Flores Pos menjadi satu-satunya media massa lokal yang paling *intens* memberitakan kasus ini. Hal ini terlihat dari jumlah pemberitaan kasus tambang mulai tahun 2008 hingga 2013 terdapat 38 pemberitaan.

Melalui wawancara dengan pihak Flores Pos ini juga peneliti kemudian mengetahui bahwa Flores Pos dengan tegas mengatakan bahwa Flores Pos menolak keberadaan tambang di Pulau Flores. Sebagai media massa, Flores Pos memposisikan diri sebagai pengawas kebijakan pemerintah daerah di seluruh Kabupaten di Pulau Flores. Melalui pemberitaannya ini Flores pos berusaha menginformasikan sekaligus mempersuasifkan masyarakat Flores mengenai bahaya tambang dan bagi mereka yang pro tambang Flores Pos berusaha meyakinkan bahwa tambang di Pulau Flores bukan sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan Flores tetapi mengakibatkan bencana yang buruk.

Berdasarkan hasil analisis level teks dan level konteks maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Flores Pos membingkai kasus penolakan tambang ini melalui kacamata missioner dan Flores Pos memihak kepada masyarakat yang kontra terhadap tambang. Flores Pos mampu memposisikan diri sebagai media yang menyuarakan kepentingan rakyat dan sudah menjadi media yang peduli terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abrar, Ana Nadya. 1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers

Dagur, Antony Bagul. 2004. *Prospek dan Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai Dalam Prespekti Masa Depan*. Jakarta Timur: Indomedia

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS

Herman, Achmad dan Jimmy Nurdiansa. 2010. *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel-Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng*. Palu: Jurnal Komunikasi

Jebadu, Alex, dkk. 2009. *Pertambangan di Flores-Lembata, Berkah atau Kutuk*. Maumere : Penerbit Ledalero

Kriyanto,Rachmad. 2007.*Teknik Praktek Riset Komunikasi Disertasi Praktis Riset Media Publik Relation, Advertising,Komunikasi Organisasi,Komunikasi Pemasaran*.Jakarta: Kencana

McQuail, Denis. 2005. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Terjemahan dari McQuail, Denis. 1987.

Rahayu. 2006. *Menyingkap profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Jurnal :

Sophie, Lecheler and Claes H.de Vreese.2012. News Framing and Publik Opinion : A Mediation Analysis of Framing Effect on political Attitude.Sage: Journalism and Mass Communication Quartely.

Website :

Indoesian Society for Social Transformation. 2013. *Rakyat Ende Tolak Tambang : Sejarah yang Terus Berulang. Kenapa?*. Diakses dari <http://www.insist.or.id/news/rakyat-ende-tolak-tambang-sejarah-yang-terus-berulang.html>. tanggal 4 Februari 2014 pukul 15.00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi NTT (KPPTSP NTT). 2004. *Data Pertambangan NTT*,diakses dari <http://www.kpptspprovntt.org/berita/sektor-pertambangan//html> tanggal 5 Feburari 2014 pukul 18.00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi NTT (KPPTSP NTT).

2004. *Data Letak Geografis*, diakses dari <http://www.kpptspprovntt.org/profil-ntt/letak-geografis.html>. tanggal 5 Februari pukul 12.00 WIB

Koran :

Lawudin,Cristo. 2013. Uskup Datangi Sejumlah Lokasi Tambang. Flores Pos, 25 Januari 2013, halaman 16

Pandong, Anton. 2011. Serise dan Saarteu Bisa “Batang Cama”. Flores Pos, 6 Januari 2011, halaman 1 dan 19

